

ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN
DI SMP NEGERI 1 BUKITTINGGIAlmasri¹, Marjoni Imamora², Demina³, Annisaul Khairat⁴¹SMP Negeri 2 Bukittinggi ; ^{2,3,4}UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Email: almasrial123@gmail.com, marjoniimamora@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract

The aims of this study were (1) to find out the implementation of quality policy in schools, (2) to prevent inhibiting and supporting factors for the implementation of quality policy in schools, (3) solutions to deal with obstacles to implementing quality policy in SMPN 1 Bukittinggi. This type of research is field research using descriptive qualitative methods. Data collection techniques used are interviews and documentation. The research results show that. 1) analysis of the quality of education policy at SMPN 1 Bukittinggi seen from the very good input elements, one of which is the selection process for prospective students and teachers, in terms of the process there is continuous coaching for each teacher and employee in the form of training and coaching, in terms of output there is an assessment standard so that graduates have high academic and non-academic achievements. 2) The inhibiting factors for quality include: there are still teachers and education staff who do not understand the importance of quality/quality by educational institutions besides that, there are parties who are against school policies, giving rise to jealousy and differences of opinion. Supporting factors include: the availability of qualified educators and education personnel. Availability of facilities and infrastructure above the minimum standard. Availability of a conducive learning process environment, discipline and other supporting factors. 3) Solutions for overcoming obstacles to school quality policies are through dissemination of school policies, optimizing compliance with National Education Standards, strengthening commitment in achieving the goals of educational institutions. An important finding in this study is that SMPN 1 Bukittinggi can be said to be a quality school. This is because the three components of education quality have been fulfilled, namely: input, process and output as a whole.

Keywords : *Quality Policy, Education, SMPN 1 Bukittinggi, Qualitative, Analysis*

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan mutu di sekolah, (2) untuk menemui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kebijakan mutu di sekolah, (3) solusi untuk menghadapi kendala pelaksanaan kebijakan mutu di sekolah SMPN 1 Bukittinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. 1) analisis kebijakan mutu pendidikan di SMPN 1 Bukittinggi dilihat dari unsur input adalah sangat baik salah satunya adanya proses seleksi untuk calon siswa dan guru, dari segi proses adanya pembinaan yang kontinyu untuk setiap guru dan karyawan berupa pelatihan dan pembinaan, dari segi output adanya standar penilaian sehingga lulusannya

mempunyai prestasi akademik dan non akademik yang tinggi. 2) Faktor penghambat mutu diantaranya: masih ada guru dan tenaga kependidikannya yang belum paham dengan pentingnya mutu / kualitas oleh lembaga pendidikan disamping itu, adanya pihak yang kontra terhadap kebijakan sekolah, sehingga menimbulkan kecemburuan dan perbedaan pandangan. Faktor pendukung diantaranya: tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Tersedianya sarana dan prasarana diatas standar minimal. Tersedianya lingkungan proses pembelajaran yang kondusif, disiplin dan faktor lain yang mendukung. 3) Solusi untuk menghadapi hambatan kebijakan mutu sekolah adalah melalui sosialisasi kebijakan sekolah, optimalisasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, penguatan komitmen dalam mencapai tujuan lembaga pendidikan. Temuan penting dalam penelitian ini adalah SMPN 1 Bukittinggi dapat dikatakan sebagai sekolah yang bermutu. Sebab, sudah terpenuhinya ketiga komponen mutu pendidikan, yaitu: input, proses, dan output secara keseluruhan.

Kata Kunci : Kebijakan Mutu, Pendidikan, SMPN 1 Bukittinggi, Kualitatif, Analisis

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pendidikan merupakan usaha pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia sebagai generasi penerus bangsa dan penentu majunya suatu bangsa dan negara. Pendidikan yang berkualitas menjadi hak setiap individu dalam sebuah negara. Hal ini merujuk pada UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pendidikan yang bermutu”. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas adalah modal dasar dalam memajukan serta mencerdaskan hidup bangsa. Proses pendidikan berkualitas ditujukan untuk mengembangkan potensi, bakat dan minat siswa sehingga bisa bersaing dalam meraih cita-citanya. Hal ini sesuai dengan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan nasional selain mengembangkan potensi, minat, serta bakat siswa. Disamping itu, pendidikan akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan setiap siswa kepada sang pencipta sehingga mampu membentuk akhlak yang baik, mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan memiliki sifat tanggung jawab yang tinggi (Mukhlisah et al., 2021).

Sebagai pemimpin dalam lingkungan sekolah, seorang kepala sekolah diharuskan memiliki kemampuan baik dalam hal manajemen, motivasi, pemangku kebijakan termasuk bersosialisasi (Indraswati & Sutisna, 2020). Kepala sekolah bertanggung jawab dalam melakukan manajemen pendidikan dengan benar. Kepala sekolah juga

bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan pengelolaan pembelajaran dapat dilakukan secara terencana dan terarah agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai (Umam, 2020). Disamping itu kepala sekolah harus profesional dalam membuat keputusan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kepala sekolah juga harus mampu menjalin komunikasi dan bersosialisasi dengan baik kepadawarga di lingkungan sekolah dan juga di luar lingkungan sekolah agar tercapainya lingkungan sekolah yang sejukserta bersemangat dalam memperjuangkan mutu. Salah satu kewajiban kepala sekolah adalah menciptakan kenyamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah dan terhadap warga sekolah yang dipimpinnya. Warga sekolah dalam hal ini adalah guru, tenaga kependidikan, siswa dan pihak lainnya.

Pendidikan yang baik ialah pendidikan yang bermutu (Kuntoro, 2019). Hal tersebut menjadi dasar pengembangan dan kemajuan bagi suatu lembaga pendidikan. Jika dalam pendidikan memiliki mutu yang baik, maka akan membuahkan hasil sumber daya manusia yang berkualitas dan baik juga (Devi, 2021). Oleh karena itu, mutu pendidikan menjadi sebuah keharusan yang harus ditingkatkan dan senantiasa bisa menjadi perhatian juga untuk para pengelola pendidikan. Pengelolaan proses pendidikan tentu diatur sedemikian rupa oleh pemerintah disuatu negara melalui kebijakan yang di keluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah RI selama ini sudah rupaya keras untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan tidak terlalu mahal sehingga bisa terjangkau untuk semua kalangan, namun upaya yang sudah dilakukan masih terdapat kekurangan dan butuh perbaikan yang lebih intensif (Febrian et al., 2023).

Kebijakan menurut Carl J. Federick sebagai program kegiatan yang diajukan oleh seseorang, sekelompok orang atau orang-orang dalam pemerintahan di sebuah lingkungan yang mana dalam menetapkan dan melaksanakannya selalu terdapat tantangan dan peluang demi terwujudnya tujuan yang diharapkan (Agustino, 2008). Dengan demikian, dalam pembentukan suatu kebijakan ada rencana dalam bentuk ide dan gagasan dan yang terpenting terdapat langkah pelaksanaan dimana apabila proses pelaksanaan tidak terwujud maka suatu usulan tidak bisa disebut dengan kebijakan. Sedangkan, James E Anderson mengatakan bahwa kebijakan adalah *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”*, yang artinya kebijakan merupakan suatu tindakan untuk memecahkan suatu permasalahan seseorang ataupun kelompok dengan menggunakan langkah-langkah ataupun kerangka (Islamy, 2009).

Dapat dinyatakan bahwa kebijakan merupakan sebuah langkah yang dilaksanakan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi dengan suatu proses pelaksanaan demi mencapai suatu tujuan tertentu. Di Kota Bukittinggi terdapat delapan SMP Negeri dan tujuh SMP Swasta. Untuk skop Bukittinggi, SMP Negeri 1 merupakan sekolah yang bermutu dan berkualitas paling baik, sehingga merupakan sekolah unggul di kota Bukittinggi. Oleh sebab itu adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat secara langsung bagaimana faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kebijakan mutu pendidikan di SMPN 1 Bukittinggi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu sebuah metode penelitian yang dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, dan berlangsung pada saat ini atau saat yang lalu (Ramdhan, 2021). Untuk dapat melihat bagaimana kebijakan mutu sekolah pada SMP Negeri 1 Bukittinggi, maka pendekatan penelitian secara deskriptif kualitatif merupakan pilihan yang tepat. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari bulan Mei 2022 sampai bulan Agustus 2022. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua (komite). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi wawancara dan studi dokumentasi.

HASIL

1. Kebijakan Mutu Pendidikan pada SMPN 1 Bukittinggi

Dalam meningkatkan mutu sekolah SMPN 1 Bukittinggi memiliki kebijakan mutu diantaranya yaitu. (1) Kebijakan yang mencakup Input. Input pendidikan ialah segala sesuatu yang diwajibkan ada dan sudah tersedia karena hal tersebut sangat diperlukan untuk berjalannya suatu proses. Seperti (a) input sumber daya manusia (kepala sekolah, guru, karyawan, dan pesertadidik) dan input sumber daya non manusia (perlengkapan, peralatan, bahan, dana, dan lain sebagainya). (b) input perangkat lunak yang meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan undang-undang, deskripsi penugasan, perencanaan pendidikan, program pendidikan, dan lain sebagainya. (c) input harapan-harapan seperti visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai oleh sekolah tersebut.

Pertama, peserta didik: dalam observasi dan wawancara yang penulis lakukan diketahui bahwa jumlah Peserta didik SMPN 1 Bukittinggi berjumlah 677 orang . dengan

jumlah siswa laki laki sebanyak 335 Orang dan siswa perempuan sebanyak 342 orang. Adapun kebijakan yang diambil sekolah dalam hal input yaitu; sebelum diterima di SMPN 1 Bukittinggi, seluruh calon siswa diketahui dulu kemampuan masing – masing, salah satunya dengan melihat hasil raport SD dan diwajibkan mengikuti ujian seleksi.

Pelaksanaan penilaian bagi peserta didik telah dibentuk baik melalui kesepakatan guru dan kepala sekolah dalam lokakarya sekolah dan juga kesepakatan yang telah disepakati dengan peserta didik dengan mempedomani kesepakatan yang telah ditentukan sekolah. Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang disampaikan kepala sekolah, wakil dan beberapa siswa dapat disimpulkan pelaksanaan kebijakan mutu sekolah untuk para peserta didik dapat diperoleh informasi yaitu diawali dengan melakukan seleksi terhadap calon siswa, dan melalui penetapan Standar KKM.. Kemampuansiswa dapat dibantu juga dengan penyaluran bakat minat dalam akademik maupun non akademik dengan mengikuti perlombaan maupun tambahan belajar lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan yang mereka miliki. Dalam hal menunjang dan memotivasi peserta didik, sekolah juga memberikan beasiswa- beasiswa yang dapat meningkatkan kemampuan yang ada pada diri peserta didik tersebut.

Kedua, tenaga guru dan tenaga kependidikan, untuk mendapatkan sumber daya manusia yg baik dan berkualitas baik Tenaga guru dan tenaga kependidikan, sekolah melakukan kebijakan adanya syarat dan kriteria tertentu yang harus dimiliki oleh setiap calon guru yang mendaftar di SMPN 1 Bukittinggi ini, salah satunya adalah mempunyai kualifikasi pendidikan yang relevan dengan mapel yang diampunya, serta juga mengikuti serangkaian tes seleksi mengajar. Dari hasil wawancara peneliti dengan pihak sekolah.

Ketiga, Sarana prasarana: sarana dan prasarana sangat penting dalam dunia pendidikan, karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih.

Hasil observasi peneliti pada bulan juni 2022 tanggal 20, prasarana minimal yang harus ada pada jenjang satuan pendidikan menengah, di SMPN 1 Kota Bukittinggi sudah terpenuhi, bahkan lebih jumlahnya dari yang seharusnya dan kriteria minimum prasarana, meliputi lahan bangunan, ruang, instalasi daya dan jasa yang dimiliki sekolah pun sudah

ada .SMP Negri 1 Bukittinggi mengupayakan agar sarana dan prasarana yang ada layak pakai, sehingga kegiatan belajar dapat berlangsung dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sarana prasarana yang ada di SMPN 1 Bukittinggi telah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah, dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah, wakil dan guru, sekolah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap fasilitas sekolah, hal itu diketahui dari salah seorang guru, dimana kalau ada alat yang rusak, maka segera di perbaiki.

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Kebijakan Mutu Sekolah Pada SMPN 1 Bukittinggi

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala sekolah, wakil serta beberapa orang guru, terkait kendala atau faktor penghambat yang membuat kepala sekolah dan beberapa personil yang bergerak dalam meningkatkan kualitas / mutu sekolah adalah ; masih ada SDM baik dari tenaga guru atau tenaga kependidikan yang belum paham akan pentingnya mutu atau kualitas setiap warga sekolah harus selalu ditingkatkan. Hal itu tercermin, ketika kepala sekolah selaku aktor yang berperan dalam mengambil kebijakan, disaat melakukan tugasnya, seperti memanggil guru atau tenaga kependidikan yang tidak sesuai kerjanya dengan yang seharusnya, maka guru atau staf tersebut terlihat mendongkol atau tidak suka dengan masukan dan teguran yang diberikan oleh kepala sekolah.

Namun jika dibandingkan dengan jumlah SDM yang lain, yang ada di SMPN 1 Bukittinggi diperoleh bahwa SDM yang tidak paham atau kurang kesadaran itu jumlahnya hanya sedikit atau beberapa orang saja, namun hal itu tetap berdampak terhadap peningkatan kualitas sekolah walau tidak signifikan. Dalam proses pembelajaran juga masih ada sebagian siswa kurang memperhatikan guru dan mata pelajaran, serta ada guru yang mengajar padat sehingga membuat ia lelah, dan kurang maksimal dalam mentransfer materi ajar, juga merupakan faktor yang menghambat kebijakan mutu sekolah. Adapun faktor pendukung yang peneliti ketahui dalam hal pelaksanaan kebijakan mutu oleh pihak SMPN 1 Bukittinggi tergambar dari hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah, wakil serta beberapa orang guru, yaitu :

“Sudah terpenuhinya dan tersedianya sarana dan prasarana minimal, Ketersediaan staf pengajar dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, Kepala sekolah yang peduli dengan

kualitas dan mutu sekolah dengan cara selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja setiap guru, karyawan dan siswa, termasuk evaluasi sikap dan kepribadian, adanya pembinaan dan pelatihan untuk guru dan karyawan yang berorientasi kepada etos kerja dan karakter. Ketersediaan infrastruktur PBM. Tersedianya PBM murah lingkungan di SMPN 1 Bukittinggi antara lain kebersihan lingkungan, Pengaturan sekolah, yaitu, menjamin keamanan dan kenyamanan, Menjaga hubungan yang harmonis, Disiplin tinggi, serta faktor pendukung lainnya adalah Tindakan kesehatan sekolah koperasi sekolah, kepemimpinan, Komunikasi dan Interaksi yang baik, Partisipasi Orang tua dan wali siswa. (Wawancara dengan Nur Elfi, S.PdI selasa 19 Juli 2022)

3. Solusi untuk Mengatasi Kendala atau Hambatan Kebijakan Mutu Sekolah Pada SMPN 1 Bukittinggi

Setiap pelaksanaan kebijakan pendidikan, baik dalam proses pendidikan maupun dalam proses belajar mengajar pasti menghadapi masalah atau hambatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Solusi untuk Mengatasi Kendala atau Hambatan Kebijakan Mutu Sekolah Pada SMPN 1 Bukittinggi yaitu (1) Sosialisasi Kebijakan Mutu Di Sekolah, (2) Optimalisasi Standar Nasional Pendidikan, (3) Penguatan Komitmen Guru dan Sekolah Sebagai Lembaga Pendidikan.

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, adapun solusi dalam pelaksanaan kebijakan mutu di SMPN 1 Bukittinggi adalah adanya permintaan oleh kepala sekolah kepada setiap warga sekolah baik guru, siswa, tenaga pendidikan, staf TU untuk komitmen dengan segala tugas yang diembannya. Serta komitmen dengan tujuan lembaga sekolah yang terpapar jelas dalam tujuan, visi, misi, strategi dan target sekolah, serta pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Dalam pelaksanaan kebijakkan mutu sekolah SMPN 1 Bukittinggi yang hampir setiap hari senin saat upacara bendera di proklamirkan dan telah diselogankan di depan gerbang SMPN 1 Bukittinggi yakni mewujudkan insan religius, jujur, cerdas, berakhlak mulia, berkarakter bangsa dan berbudaya lingkungan

PEMBAHASAN

1. Analisis Kebijakan Mutu Pendidikan pada SMPN 1 Bukittinggi

Kebijakan menurut Carl J. Federick sebagai program kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok orang atau orang-orang dalam pemerintahan di suatu lingkungan yang mana dalam menetapkan dan melaksanakannya selalu terdapat tantangan dan peluang demi terwujudnya tujuan yang diharapkan (Agustino, 2008). Sedangkan Mutu sekolah yang dirujuk pada pendapat Suharsimi (2006) menyatakan bahwa pendekatan penelitian dalam bidang pendidikan dapat meliputi pendekatan proses (*process approach*), pendekatan hasil (*output approach*), dan pendekatan dampak (*outcome approach*).

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan mutu sekolah merupakan suatu program kegiatan yang diajukan oleh seseorang ataupun kelompok untuk dilaksanakan melalui pendekatan-pendekatan baik itu segi input, proses maupun output untuk mencapai suatu tujuan tertentu demi keberlangsungan bersama.

SMPN 1 Bukittinggi merupakan Sebuah sekolah yang berdiri dibawah naungan pemerintah, pelaksanaan dan hasil kebijakan mutu sekolah di SMPN 1 Bukittinggi. Dari data yang diperoleh peneliti memberikan analisis terhadap kebijakan mutu sekolah tersebut dengan menggunakan teknik analisis yang digunakan James P. Spradley yang dimodifikasi menjadi 7 langkah

Analisis peneliti terhadap Kebijakan mutu yang dilakukan oleh SMPN 1 Bukittinggi mencakup segi input, segi proses, dan segi output. Aspek kebijakan mutu dari segi input yakni: peserta didik, tenaga guru dan kependidikan, sarana prasarana, adapun analisis kebijakan mutu dari segi proses yaitu mencakup proses pembelajaran, gaya belajar, penguasaan dan metode yang digunakan guru, Sedangkan segi output seperti hasil akademik dan non akademik menambah keunggulan SMPN 1 Bukittinggi.

Kebijakan mutu sekolah terletak pada sumber daya manusia yang bertindak sebagai pelaksana suatu kebijakan termasuk pada peserta didik. Adapun kebijakan yang diambil sekolah dalam hal input yaitu; sebelum diterima di SMPN 1 Bukittinggi, seluruh calon siswa diketahui dulu kemampuan masing – masing, salah satunya dengan melihat hasil raport SD dan diwajibkan mengikuti ujian. seleksi. Pihak sekolah melakukan perencanaan yang baik dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru. Perencanaan

tersebut meliputi adanya sosialisasi terlebih dahulu untuk membuat tatacara penerimaan pesertadidik. Kemudian dibentuk panitia yang telah dibagi tugasnya masing-masing seperti: penyeleksian, verifikasi berkas, pelaksanaan tes hingga sampai pada penetapan calon peserta didik baru. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui dan mengatur persentasi penerimaan pesertadidik baru sesuai dengan kualifikasinya yang akan dijadikan sebagai peserta didik SMPN 1 Bukittinggi. Untuk meningkatkan mutu input (Peserta didik) sekolah juga menetapkan standar penilaian yang meliputi kompetensipengetahuan, sikap dan keterampilan. Sehingga siswa yang belajar diSMPN 1 Bukittinggi menjadi manusia yang mempunyai pengetahuan tinggi, emosional dan spiritual yang bagus, serta ketrampilan yang memadai. Penetapan standar tersebut, terlebih dahulu disepakati dengan pimpinan maupun dengan peserta didik itu.

Dalam pendidikan sarana prasarana sangatlah penting untuk mencapai tujuan yang dapat menunjang proses pembelajaran, untuk mewujudkan visi misi sekolah dengan mengembangkan potensi bakat miat peserta didik dalam kegiatan intarakurikuler ataupun ekstrakurikuler tentu adanya sarana dan prasarana untuk meningkatkan berjalannya kebijakan yang berlaku. Menurut Holsinger & Cowell (2010) mengemukakan “indikator mutu pendidikan yaitu: pendidik, peserta didik, proses pembelajaran, sarana dan fasilitas belajar dan manajemen sekolah”

Tenaga guru dan kependidikan, pendidikan tidak jauh dari tenaga guru dan tenaga kependidikan yang merupakan penentu kesuksesan dalam membentuk kebijakan mutu sekolah yang baik. Tenaga guru dan tenaga kependidikan yang bekerja disini memiliki standar yang telah terpenuhi sesuai dengan keahlian yang mereka ampu. Kepala SMP Negeri 1 Bukittinggi dijabat oleh Yusrizal, M.Pd. Jumlah guru adalah 42 orang terdiri dari 37 orang PNS dan 5 orang Non PNS, guru pengampu mata pelajaran, sebahagian besar guru pengampu di SMP N 1 Bukittinggi telah menempuh jenjang pendidikan Sarjana Strata 1, dan 4 orang Magister Pendidikan (S2).

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yg baik dan berkualitas baik Tenaga guru dan tenaga kependidikan, sekolah melakukan kebijakan adanya syarat dan kriteria tertentu yang harus dimiliki oleh setiap calon guru yang mendaftar di SMPN 1 Bukittinggi ini,salah satunya adalah mempunyai kualifikasi pendidikan yang relevan dengan mapel yang diampunya, serta juga mengikuti serangkaian tes seleksi mengajar.

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Kebijakan Mutu Sekolah Pada SMPN 1 Bukittinggi.

Faktor penghambat yang membuat kepala sekolah dan beberapa personil yang bergerak dalam meningkatkan kualitas / mutu sekolah adalah ; masih ada SDM baik dari tenaga guru atau tenaga kependidikan yang belum paham akan pentingnya mutu atau kualitas setiap warga sekolah harus selalu ditingkatkan. Hal itu tercermin, ketika kepala sekolah selaku aktor yang berperan dalam mengambil kebijakan, disaat melakukan tugasnya, seperti memanggil guru atau tenaga kependidikan yang tidak sesuai kerjanya dengan yang seharusnya, maka guru atau staf tersebut terlihat mendongkol atau tidak suka dengan masukan dan teguran yang diberikan oleh kepala sekolah .Namun jika dibandingkan dengan jumlah SDM yang lain, yang ada di SMPN 1 Bukittinggi diperoleh bahwa SDM yang tidak paham atau kurang kesadaran itu jumlahnya hanya sedikit atau beberapa orang saja, namun hal itu tetap berdampak terhadap peningkatan kualitas dan mutu Sekolah walau tidak signifikan.

Mutu sekolah mengacu pada mutu pengajaran pada tingkat satuan pendidikan menurut Holsinger & Cowell (2010) yaitu Indikator mutu pendidikan, yaitu: Guru, siswa, proses pembelajaran, sekolah dan fasilitas serta manajemen sekolah" Hal ini sejalan dengan pendapat Arikunto (2006) bahwa pendekatan penelitian dalam pendidikan dapat mencakup pendekatan proses, keluaran dan hasil. Merujuk pada cara berpikir Sallis, mengidentifikasi beberapa ciri:

3. Solusi untuk Mengatasi Kendala atau Hambatan Kebijakan Mutu Sekolah Pada SMPN 1 Bukittinggi

Secara umum strategi pengendalian mutu sekolah dilaksanakan secara berkesinambungan. Peningkatan mutu pendidikan bertujuan untuk peningkatan mutu, kreativitas, dan produktivitas karyawan dan guru secara berkesinambungan. Setiap pelaksanaan kebijakan pendidikan, baik dalam proses pendidikan maupun dalam proses belajar mengajar pasti menghadapi masalah atau hambatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Beberapa solusi yang diterapkan oleh SMPN 1 Bukittinggi antara lain sebagai berikut: Pertama, sosialisasi Kebijakan Mutu Di Sekolah, berdasarkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan sumber yang didapat serta di dukung dengan pernyataan Arikunto (2006) yang menyatakan mutu sekolah dalam bidang pendidikan meliputi pada pendekatan proses, pendekatan hasil dan

pendekatan dampak SMPN 1 Bukittinggi memiliki hasil analisis kebijakan mutu sekolah yang seimbang dan dapat membanggakan serta mengharumkan nama sekolah. Dengan pencapaian prestasi-prestasi siswa-siswi terhadap kegiatan baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dalam tingkat kota, propinsi dan juga nasional.

Seiring dengan pendapat Day & Sammons (2016) yang salah satunya "*High Expectation*" harapan yang tinggi untuk semua peserta didik melibatkan guru dalam mengambil peran aktif untuk mendukung dan memonitoring kemajuan siswa, menkomunikasikan harapan mengenai tingkat prestasi serta memberikan tantangan untuk intelektualnya. Dengan kegiatan yang dilakukan sekolah serta beberapa pendapat yang sejalan dengan SMPN 1 Bukittinggi memberikan "*Positive Reinforcement*" yakni penguatan yang positif dengan melibatkan aspek agar peserta didik menjadi semangat dan termotivasi lagi dalam berprestasi yang akan datang.

Apresiasi ini juga terbukti dari beberapa dokumentasi atas dukungan dari kepala dinas yang menyempatkan mengalungkan dan mensupport siswa siswi yang berprestasi tersebut. Kegiatan apresiasi yang dilakukan kepala dinas inilah yang merupakan penguat dan memberikan peluang yang positif bagi peserta didik terhadap bakat, minat dan kemampuan yang telah mereka kembangkan selama proses belajar mengajar yang mereka jadikan sebagai tujuan dan fokus masa depannya.

Optimalisasi Standar Nasional Pendidikan, upaya peningkatan mutu sekolah didasarkan pada standar mutu nasional sebagai indikator keberhasilan sekolah dalam memecahkan masalah. Standar yang digunakan adalah standar kualifikasi studi, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar instruktur dan trainer, standar infrastruktur, standar pendanaan dan standar pengelolaan. Kepala sekolah menjelaskan pemenuhan indikator yang terkait dengan standar mutu pendidikan nasional sekolah.

Penguatan Komitmen Guru dan Sekolah Sebagai Lembaga Pendidikan, adapun solusi dalam pelaksanaan kebijakan mutu di SMPN 1 Bukittinggi adalah adanya permintaan oleh kepala sekolah kepadasetiap warga sekolah baik guru, siswa, tenaga pendidikan, staf TU untuk komitmen dengan segala tugas yang diembannya. Sertakomitmen dengan tujuan lembaga sekolah yang terparapap jelas dalam tujuan, visi, misi, strategi dan target sekolah, serta pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Dalam pelaksanaan kebijakan mutu sekolah SMPN 1 Bukittinggi yang hampir setiap hari senin saat upacara bendera di proklamirkan dan telah diselenggarakan di depan gerbang SMPN 1 Bukittinggi yakni mewujudkan insan religius, jujur, cerdas, berakhlak mulia, berkarakter bangsa dan berbudaya lingkungan.

KESIMPULAN

Kebijakan merupakan suatu penilaian-penilaian yang diberikan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi sekolah terutama bagi SMPN 1 Bukittinggi. Analisis kebijakan mutu sekolah selalu diperbaiki sekolah agar mutu sekolah dapat menjadi yang terbaik dan dapat dicontoh bagi sekolah- sekolah lainnya. Berdasarkan penelitian di SMPN 1 Bukittinggi peneliti menemukan .

1. Analisis kebijakan mutu pendidikan di SMPN 1 Bukittinggi dilihat dari unsur input adalah sangat baik salah satunya adanya proses seleksi untuk calon siswa dan guru, dari segi proses adanya pembinaan yang kontinyu untuk setiap guru dan karyawan berupa pelatihan dan pembinaan, dari segi output adanya standar penilaian sehingga lulusannya mempunyai prestasi akademik dan non akademik yang tinggi.
2. Faktor penghambat mutu diantaranya: masih ada guru dan tenaga kependidikannya yang belum paham dengan pentingnya mutu / kualitas oleh lembaga pendidikan disamping itu, adanya pihak yang kontra terhadap kebijakan sekolah, sehingga menimbulkan kecemburuan dan perbedaan pandangan. Faktor pendukung diantaranya: tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Tersedianya sarana dan prasarana diatas standar minimal. Tersedianya lingkungan proses pembelajaran yang kondusif, disiplin dan faktor lain yang mendukung.
3. Solusi untuk menghadapi hambatan kebijakan mutu sekolah adalah melalui sosialisasi kebijakan sekolah, optimalisasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, penguatan komitmen dalam mencapai tujuan lembaga pendidikan. Temuan penting dalam penelitian ini adalah SMPN 1 Bukittinggi dapat dikatakan sebagai sekolah yang bermutu. Sebab, sudah terpenuhinya ketiga komponen mutu pendidikan, yaitu: *input*, *proses*, dan *output* secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. *Bandung: Alfabeta*.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Day, C., Gu, Q., & Sammons, P. (2016). The Impact of Leadership on Student Outcomes: How Successful School Leaders Use Transformational and Instructional Strategies to Make a Difference. *Educational Administration Quarterly*, 52(2), 221–258. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0013161X15616863>
- Devi, A. D. (2021). Analisis Mutu dan Kualitas Input-Proses-Output Pendidikan di MAN 1 Tulang Bawang Barat. *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 1–13.
- Febrian, V. R., Khairat, A., Fazis, M., & Husnani, H. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Berbasis E-Book pada Mata Kuliah Manajemen Strategi. *MANAZHIM*, 5(1), 374–385.
- Holsinger, D. ., & Cowell, R. N. (2010). Positioning Secondary School Education in Developing Countries : Expansion and curriculum. *UNESCO : International Institute for Educational Planing*.
- Indraswati, D., & Sutisna, D. (2020). Implementasi Manajemen Mutu di SDN Prambon. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 5(2), 10–21.
- Islamy, M. I. (2009). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Kuntoro, A. T. (2019). Manajemen mutu pendidikan Islam. *Jurnal Kependidikan*, 7(1), 84–97.
- Mukhlisah, A., Yasin, H., & Meila, I. (2021). Etika Guru dan Murid. *Tabdzib Al-Akblaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 61–79.
- Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. *Cipta Media Nusantara*.
- Umam, M. K. (2020). Dinamisasi Manajemen Mutu Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Hikmah*, 8(1), 61–74.